

KAPASITAS ORGANISASI PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

ORGANIZATIONAL CAPACITY OF THE MANAGEMENT OF PUBLIC STREET LIGHTING

Yosi Suita Siringo-Ringo*, Siti Hazzah Nur. R

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Koresponden email: yosisuita@gmail.com

ABSTRAK

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) juga merupakan fasilitas dari pemerintah yang sangat dibutuhkan dan juga sangat membantu seluruh elemen masyarakat. Alat Penerangan Jalan (APJ) merupakan unsur perlengkapan jalan, hal ini berkaitan langsung dengan pengguna jalan sesuai regulasi di Indonesia. Sebagai pengguna pelayanan Lampu penerangan jalan umum (LPJU) masyarakat berharap untuk ketersediaan lampu jalan yang diberikan cahaya lampu yang cukup sehingga dapat membantu masyarakat dalam melintas pada malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapasitas dinas perhubungan Labuhan Batu Utara dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Data dan informasi yang didapat, dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan klasifikasi kapasitas organisasi komponen sumber daya dan komponen manajemen yang terdiri dari beberapa elemen indikator yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, kepemimpinan dan jaring hubungan dengan pihak lain. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan kapasitasnya belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara dilihat dari kurangnya respon Dinas Perhubungan kepada masyarakat dalam setiap pengaduan yang diterima, sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas tidak sesuai SOP, kurangnya teknisi dalam pengelolaan LPJU, kurangnya seseorang pemimpin untuk mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Ketidakmaksimalan ini mengakibatkan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak berfungsi dengan baik dan memberikan ketidaknyamanan masyarakat melintas pada malam hari.

Kata kunci: Organisasi; Kapasitas; Lampu Penerangan Jalan Umum

ABSTRACT

Public Street Lighting (LPJU) is also a facility from the government that is very much needed and also very helpful for all elements of society. Street Lighting Equipment (APJ) is an element of road equipment, this is directly related to road users according to regulations in Indonesia. As a user of public street lighting (LPJU) services, the community hopes for the availability of street lights that are given sufficient light so that they can help the community in passing at night. This study aims to analyze how the capacity of the North Labuhan Batu transportation department in the management of Public Street Lighting. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data and information collection is done through interviews, observation and documentation. The research was conducted at the North Labuhan Batu Regency Transportation Office. The data and information obtained were analyzed qualitatively descriptively using the classification of organizational capacity of the resource component and the management component which consists of several indicator elements, namely human resources, infrastructure, leadership and networking relationships with other parties. The results of the study indicate that the North Labuhan Batu Regency Transportation Office based on its capacity has not been maximized in carrying out its duties and responsibilities in managing public street lighting in North Labuhan Batu Regency as seen from the lack of response from the Transportation Office to the public in every complaint received, the attitude of responsibility in carrying out tasks is not in accordance with the SOP, the lack of technicians in managing LPJU, the lack of a leader to manage and organize the organization to achieve a goal. This inadequacy has resulted in Public Street Lighting in North Labuhan Batu Regency not functioning properly and providing inconvenience to the passing public at night.

Keywords: Organization; Capacity; Public Road Lighting

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam bidang pelayanan salah satunya adalah pelayanan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) yang digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber

daya maupun anggaran. Penerangan jalan harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengguna jalan, terutama pada malam hari (Andrianto & Muharni, 2023). Secara spesifik, Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa lampu penerangan

jalan atau alat penerang jalan merupakan salah satu jenis perlengkapan jalan wajib yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah salah satu infrastruktur yang dapat memenuhi jalan sehingga bertujuan untuk digunakan pada malam hari, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat khususnya di jalan umum Kabupaten LabuhanBatu Utara.

Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan buah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan lampu penerangan, hal ini diketahui bahwa kebutuhan lampu penerangan jalan itu sangat penting atau mendasar, sehingga perkembangan suatu daerah dalam aspek penerangan jalan mempunyai posisi strategis dan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, maka dari itu lampu penerangan jalan sangat dibutuhkan sekali dalam memberikan keamanan, kenyamanan kota.

Saat ini, kondisi lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat dikatakan kurang baik. Terbukti dari banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum yang masih tidak menyala pada malam hari. Salah satu permasalahan ini dibuktikan dari beberapa publikasi media yang menyatakan bahwa masih adanya masalah terkait kerusakan lampu penerangan jalan umum. Berikut hasil observasi terkait kerusakan lampu penerangan jalan umum. Dalam mewujudkan pelayanan sebuah organisasi yang baik agar dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan merupakan salah satu tujuan penerapan *good governance* dalam penyediaan pelayanan barang. Apabila tujuan tersebut berhasil diwujudkan, maka akan memperoleh manfaat dan image positif (Arini, 2021). Sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak berhasil maka pelayanan yang didapatkan tidak efektif, efisien dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, tujuan yang diharapkan juga masih belum terealisasi secara maksimal. Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan di kabupaten Labuhan Batu Utara, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum. Masalah yang ditemui dilapangan yaitu ada beberapa titik lampunya mati total dan tidak terlihat pergerakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara untuk memperbaiki kerusakan tersebut sebagai dari pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang harusnya di lakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Seperti yang di jelaskan bahwa setiap organisasi memerlukan sumber daya seperti material dan mesin. Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai instansi pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara berfungsi untuk membangun fasilitas Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bertanggung jawab mengelola LPJU untuk memudahkan jalannya pemeliharaan dan perawatan lampu jalan. Terdapat sejumlah prasarana untuk jalannya pemeliharaan, seperti mobil operasional. Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara yaitu berjumlah 2 unit anantara lain merek Hino, Mitsubishi Colt Diesel mobil tersebut berjenis mobil tangga yang digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kabupaten LabuhanBatu Utara. Namun kendaraan operasional berupa mobil tangga tidak semuanya dalam keadaan baik beberapa dalam kondisi rusak berat. Dari informasi yang didapatkan bahwa kendaraan yang dapat beroperasi hanya satu unit. Kondisi ini dapat menghambat perawatan dan pemeliharaan lampu jalan. Artinya Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara belum bisa semaksimal mungkin mengadakan, merawat dan memelihara prasarana umum, dampaknya mengakibatkan kondisi penerangan jalan umum dalam perawatan dan pemeliharanya terhambat dan tidak berjalan dengan baik.

Pelaksana kegiatan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan umum di Kabupaten LabuhanBatu Utara tidak terlepas dari tenaga teknis dalam perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, baik pemasangan baru maupun kegiatan perbaikan. Hal ini menjadi permasalahan dalam pencapaian penanganan lampu penerangan jalan umum dikarenakan jumlah tenaga teknis perawatan pemeliharaan dari segi jumlah belum memadai, tenaga teknis yang dilapangan sekarang berjumlah 3 orang. Selanjutnya dari segi pelaksanaan perbaikan lampu penerang jalan umum masih belum tepat sasaran hal ini terlihat dalam pembanguan lampu penerang jalan umum yang terakhir ini menjadi pertanyaan masyarakat sebagai kelompok sasaran padahal dari segi presentasi masih banyak lampu jalan yang rusak di daerah lainnya yang jauh lebih membutuhkan. Terakhir pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan lampu penerang jalan umum ini sudah berjalan akan tetapi belum maksimal hal ini terlihat dari kualitas penanganannya masih belum sesuai dengan standar yang telah di tetapkan misalnya kualitas bola lampu dan pemasangan tiangtiang lampu penerang jalannya yang masih dinilai belum tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi ilmiah yang relevan dengan objek permasalahan sehingga peneliti mampu menggambarkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan pene-

litian sebelumnya. Adapun penelitian pertama yang dilakukan oleh Ray F. Melati pada tahun 2020 dengan judul Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan inovatif dari Mark Considine Institusional, Struktural, skeptis, ikremental dan adaptif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa kendala berinovasi kebijakan pengelolaan penerang jalan umum terletak pada masalah klasik antara lain sumber daya manusia, manajerial dan finansial.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Lasiyono (2022). Dalam penelitian ini kualitas SDM masih kurang, sehingga dalam penanganan kerusakan lampu penerang jalan umum berjalan lambat dan kualitas sistem yang belum terhubung secara otomatis kepada Satuan Tugas Perangkat daerah (SKPD). Sedangkan konsep sistem informasi yang bisa diterapkan oleh petugas adalah sistem yang bisa memantau atau memonitoring lampu penerangan jalan dari kantor, dengan sistem tersebut petugas akan langsung mengetahui lokasi lampu penerangan jalan jika terjadi kerusakan tanpa menunggu informasi dari warga.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2012). Melalui penelitian ini diketahui bahwa kendala yang di temui adalah banyaknya lampu jalan yang belum di materisasi penggunaan lampu yang belum standar penggunaan pemakaiannya sehingga dapat merugikan Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak PLN. Terakhir, terdapat penelitian yang dilakukan Widodo (2016). Melalui penelitian ini terdapat kendala penggunaan daya listrik yang tidak terkontrol, Banyak penggunaan listrik untuk penerangan jalan umum yang ilegal oleh masyarakat. Sedangkan penggunaan daya tersebut oleh PLN tetap dibebankan kepada Pemda atau Pemkot. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengantisipasi hal tersebut dengan penggunaan daya listrik secara efisien dan optimal antara lain dengan cara pemasangan meteran listrik untuk penerangan jalan umum di dalam kota.

Urgensi pada penelitian ini dapat di lihat dari permasalahan yang ditemukan. Permasalahan pertama kurangnya sosialisasi terbuka kepada masyarakat sehingga perencanaan perbaikan kerusakan lampu penerang jalan umum tidak tepat sasaran. Kedua, kurangnya Koordinasi antar pegawai dalam rangka perbaikan kerusakan lampu penerang jalan umum sehingga keresahan masyarakat yang melintas atau pengguna jalan mengalami ketakutan akibat rawannya tindak kriminalitas di tempat gelap. Selanjutnya Kualitas sumber daya aparatur yang kurang berkompeten di bidang lampu penerangan jalan sedangkan pemeliharaan lampu penerang jalan umum mencakup seluruh Kabupaten

Labuhan Batu Utara terkhusus di Kecamatan Kuala Hulu tepatnya di Desa Simangalam akibatnya pemeliharaan, perawatan serta perbaikan lebih lama.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan metode observasi, dan wawancara. Kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik sampling yang bertujuan untuk menjangkau informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang digunakan dan merincikan kekhususan yang ada dalam suatu konteks yang unik. Informan yang dipilih oleh peneliti harus mereka yang memiliki keterlibatan langsung, sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih akurat dan terperinci. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan pengambilan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan mengambil informasi dari berbagai perspektif yang berbeda untuk menemukan tingkat kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi sebagai satu kesatuan dari individu atau kelompok untuk menjalin interaksi dan kerjasama guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tentunya setiap organisasi memiliki kapasitas. Keberhasilan sebuah organisasi atau institusi pemberi layanan dalam meraih tujuannya akan ter-

wujud apabila kapasitas organisasi melalui kesiapan individu sumber daya manusia dari sebuah organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dan menggambarkan kapasitas organisasi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat ditinjau melalui wawancara secara mendalam dan hasil observasi peneliti. Sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah aset terbesar yang dimiliki oleh organisasi, oleh karena itu organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam menjalankan tugas dan perannya. Pengelolaan dan pengendalian penerangan lampu jalan umum menjadi tugas pokok dari seksi penerangan lampu jalan di Dinas Perhubungan. Kegiatan program perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara baru tidak terlepas dari tenaga teknis dalam perawatan dan pemeliharaan, namun ini masih menjadi permasalahan dalam pencapaian penanganan lampu penerangan jalan umum dikarenakan jumlah tenaga teknis perawatan dan pemeliharaan dari segi jumlah yang belum memadai dengan jumlah titik lokasi lampu penerangan jalan umum, sehingga banyak lokasi titik lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara belum tertangani. Jumlah personil teknis di Dinas Perhubungan yang cakupan wilayah kerjanya adalah satu Kabupaten dapat terbilang masih kurang ditambah dengan banyaknya kerusakan lampu di berbagai titik wilayah. Dari segi kuantitas personil teknis pemeliharaan lampu penerangan jalan umum tentu nya masih kurang sedangkan dari segi kualitas, personil teknis ini tentunya sudah mendapatkan pelatihan sebagai modal dalam melaksanakan tugas tugasnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan.

Kualitas tidak dibarengi dengan kuantitas yang memadai akan menjadikan organisasi itu tidak optimal dalam menjalankan tugas nya, kuantitas teknis seharusnya disesuaikan dengan beban kerja yang ada, sedangkan yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memiliki 8 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 82 desa hanya diberikan 3 teknis saja. Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya (Syafitri et al., 2020).

Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara kurang mampu dalam pemeliharaan maupun perawatan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Disesuaikan dengan Visi misi Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Kabupaten Labuhan Batu Utara Dengan Sumber

Daya Manusia yang cerdas, Sejahtera. Namun kenyataannya masyarakat seringkali belum merasa sejahtera karena belum mendapatkan penerangan yang optimal dari Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan kurangnya teknisi dalam memperbaiki kerusakan lampu jalan. Banyak daerah yang masih mengalami masalah dengan penerangan jalan yang kurang memadai atau bahkan mati total di beberapa lokasi, meningkatkan risiko kejahatan, kecelakaan, dan merasa tidak aman saat beraktivitas di malam hari. Ketidakoptimalan LPJU juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti membatasi aksesibilitas jalan dan mengurangi aktivitas malam di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan dan perbaikan LPJU yang lebih intensif dan efektif menjadi sangat penting bagi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber daya manusia ini adalah elemen yang sangat berpengaruh bagi organisasi untuk mempertahankan eksistensinya oleh karena itu kuantitas dan kualitas SDM sangat penting dalam jalannya sebuah organisasi untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggungjawabnya. Dinas Perhubungan dalam elemen SDM ini tentunya belum maksimal naik itu menyediakan sdm yang memadai dan berkualitas, untuk memperkuat kualitas sdm dilakukan pelatihan dan dari segi kuantitas tidak memadai kondisi ini menggambarkan bahwa dinas perhubungan kurang dalam mempertahankan eksistensinya untuk mengelola dan memelihara LPJU karena dari kondisi ketersediaan teknis dapat dilihat guna untuk mencapai kinerja yang optimal tidak terjadi namun pada kenyataannya terjadi over capacity beban kerja yang mengakibatkan persoalan kerusakan dan pemeliharaan LPJU sulit untuk dituntaskan.

Infrastruktur

Infrastruktur ialah sumber daya yang digunakan dalam organisasi yang meliputi sarana dan prasarana, anggaran dan pemanfaatan teknologi sebagai penunjang organisasi dalam menjalankan tugasnya. Pentingnya membuat perencanaan kapasitas sumber daya untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, hal ini dapat dilakukan sebagai upaya memelaraskan kapasitas sumber daya dengan kebutuhan sumber daya organisasi, Libby, Tanda (2024). Deskripsi gambaran kondisi infrastruktur Dinas Perhubungan dalam pengelolaan LPJU dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondisi Sarana Dan Prasarana Operasional

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan optimalisasi kinerja organisasi. Adapun kondisi kelengkapan sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan diketahui bahwa

sarana dan prasarana kurang memadai. Jumlah ketersediaan prasarana pemeliharaan LPJU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Prasarana Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Labuhan Batu Utara

No	Merk	Jenis	Jumlah
1.	Hino	Mobil Tangga	1 Unit
2.	Mitsubishi Colt Diesel	Mobil Tangga	1 Unit
Jumlah			2 Unit

Sumber : Laporan Dinas Keuangan dan Perpajakan Daerah, 2022

Untuk keseluruhan sarana dan prasarana operasional, tetap dilakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

b. Kondisi Anggaran

Anggaran dalam sebuah organisasi menjadi elemen yang sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Sumber pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang paling besar ialah pajak galiansi dan pajak restorat, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pajak penerangan jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara terus mengalami peningkatan yaitu.

Tabel 2. Jumlah Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Pajak
1.	2018	2.510.134.892
2.	2019	3.270.389.481
3.	2020	3.702.507.635
4.	2021	3.909.178.862
5.	2022	3.768.601.176

Sumber : Laporan Dinas Keuangan dan Perpajakan Daerah, 2022

Berdasarkan Tabel diatas berisikan jumlah pendapatan pajak penerangan jalan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berbicara mengenai anggaran dalam pengelolaan LPJU berada di kondisi kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa anggaran dalam pengelolaan LPJU ini masih sangat kurang dan kondisi ini menjadi salah satu kendala utama. Keterbatasan anggaran ini menjadikan beberapa tugas dalam pemeliharaan dan perbaikan tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan permasalahan kerusakan lamp uterus bertambah dan sulit untuk diatasi.

c. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi menjadi cara organisasi untuk berkembang mengikuti perubahan untuk menciptakan sistem yang lebih optimal. Dinas Perhubungan dalam pengelolaan LPJU sudah memanfaatkan teknologi hal ini. Berdasarkan hasil wawancara disampaikan bahwa penggunaan teknologi digunakan untuk membantu pengelolaan LPJU tidak hanya untuk mempercepat pekerjaan, teknologi juga dimanfaatkan sebagai inovasi guna menciptakan cara dan strategi dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Keseluruhan kondisi sarana dan prasarana, anggaran serta pemanfaatan teknologi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat dikatakan

belum mencapai kondisi yang optimal, karena masih ditemui beberapa titik permasalahan yang menghambat pengelolaan LPJU sehingga esensi dari LPJU tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara baik. Namun Dinas Perhubungan menunjukkan cadangan kapasitas yang sangat besar dalam bentuk ketahanan kolektif, energi sosial, keberanian, kesetiaan, dan kecerdikan. Kualitas-kualitas ini memungkinkan organisasi untuk bertahan dan berkembang seiring waktu.

Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi meliputi: perencanaan, menggerakkan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (Simarmata et al., 2021).

Dalam perencanaan terdapat beberapa hal yang menjadi analisa penulis, yaitu sebagai berikut.

a. Kemampuan Staf Perencanaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala sub bagian Program dan Kepala petugas di lapangan terkait pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu jalan diperoleh bahwa staf atau personil yang dipilih memiliki background atau latar belakang yang disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Namun narasumber lain dalam penelitian ini mengatakan bahwa staf perencanaan belum bekerja dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari bahan dan alat penerangan yang direncanakan oleh staf perencanaan tidak memiliki kualitas yang baik.

b. Kemampuan Organisasi Perencanaan

Kemampuan organisasi dalam menganalisa SWOT adalah hal yang sangat diutamakan untuk kesuksesan sebuah program atau proyek. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program atau proyek.

Peneliti melakukan observasi langsung dan ditemukan bahwa kemampuan organisasi perencanaan pada kenyataannya memahami apa itu SWOT baik secara teori hanya saja secara aplikasinya masih belum terlaksana dengan baik. Terlepas dari siapa saja yang merencanakan program, maka ia harus memahami apa kelebihan, kekurangan, tantangan. Bisa jadi bagian perencanaan tidak memahami itu dalam perencanaan minimal harus memahami apa itu SWOT sehingga perencanaan sulit diaplikasikan di lapangan.

Manajemen Proses

Gambaran manajemen proses pada Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kemampuan organisasi dalam bersikap berprilaku dalam merespon keluhan masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara, tentang pemeliharaan Lampu Jalan diperoleh bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah mendengar dan menerima keluhan dari masyarakat mengenai kerusakan lampu jalan. Untuk menangani keluhan masyarakat tersebut dinas berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan, dimana setiap keluhan masyarakat langsung masuk ke sistem pelaporan Dinas Perhubungan. Dengan pelaporan keluhan yang masuk maka Dinas Perhubungan dengan cepat menugaskan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan kelapangan dan mengambil tindakan sesuai tingkat kerusakan dan mulai memperbaiki lampu jalan. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa respon terkait keluhan masyarakat belum sepenuhnya cepat ditanggapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hal tersebut dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

No	Sarana Pengaduan	Jumlah Laporan Pengaduan	Jumlah Sudah Mendapatkan Respon
1.	Surat	175 Orang	93 Orang
2.	Media Watshap	100 Orang	70 Orang
Total		275 Orang	163 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan organisasi dalam bersikap dan berperilaku yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam merespon keluhan masyarakat masih dikatakan belum optimal. Merujuk dari pendapat Rahmayanty (2010:93), bahwa semua keluhan masyarakat dapat direspon setiap penyelenggara pelayanan publik.

b. Kemampuan Organisasi Dalam Bersikap Berprilaku Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawab

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara, tentang pemeliharaan Lampu Jalan diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah melakukan pemeliharaan secara rutin, pemeliharaan yang dilakukan berupa pemeriksaan rutin, perbaikan lampu rusak maupun mati jika diperlukan serta mengganti komponen yang sudah tidak

berfungsi dengan baik. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa pemeliharaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara belum optimal. Hal tersebut dilihat dari banyaknya lampu mati dan rusak yang belum diperbaiki yang mengakibatkan jalan gelap pada malam hari.

Pasal 112 menyebutkan pemeliharaan secara berkala meliputi (1) Pemeliharaan bangunan konstruksi; (2) Pemeliharaan instalansi kelistrikan; (3) Pembersihan komponen optik dari debu atau kotoran; (4) Pengecekan dan perbaikan kerusakan; (5) Pengecekan komponen catu daya; (6) Menghilangkan benda di sekitar armature yang dapat menghalangi atau mengurangi intensitas cahaya; (7) Pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau megger test.

Sesuai pasal 112 terkait pemeliharaan penyelenggara alat penerangan jalan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara belum dapat menjalankan tugas sesuai Peraturan Menteri. Pertama pemeliharaan bangunan konstruksi yang tidak pernah dilakukan berupa kegiatan menjaga kondisi fisik fungsionalitas, keamanan dan keberlanjutan bangunan, yang ke dua pemeliharaan kelistrikan dimana tidak pernah melakukan berupa kegiatan pencegahan dan perawatan, ketiga pembersihan komponen optik dari debu atau kotoran tidak pernah dilakukan sehingga debu dapat mengganggu kinerja sensor optik, menyebabkan penurunan kualitas gambar, bahkan merusak komponen-komponen tersebut secara permanen.

c. Capaian dan Hasil

Setiap upaya yang dilakukan oleh organisasi tentunya akan menciptakan capaian maupun hasil. Adapun capaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan LPJU belum maksimal hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. Laporan Pengaduan LPJU Rusak Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Pelapor	PJU Rusak	PJU Perbaiki
1.	Kualuh Hulu	25 Orang	336 Unit	207Unit
2.	Kualuh Selatan	88 Orang	1225unit	912 unit
3.	Kualuh Hilir	36 Orang	383 unit	212 unit
4.	Kualuh Ledong	52 Orang	481 unit	310 unit
5.	Na IX-X	40 Orang	400 unit	278 unit
6.	Merbau	25 Orang	413 unit	245 unit
7.	Aek Kuo	25 Orang	365 unit	200 unit
8.	Aek Natas	20 Orang	430 unit	250 unit

Sumber: Dinas Perhubungan kab. Labuhan Batu Utara, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat capaian atas perbaikan lampu jalan dari ke-8 Wilayah dilihat segi kuantitas PJU yang diperbaiki tidak ada satupun wilayah yang jumlah PJU rusak keseluruhan diperbaiki. Terjadinya hal ini dikarenakan kondisi dari Dinas Perhubungan itu sendiri yang kurang maksimal seperti SDM

kuantitas, kondisi sarana prasarana dan anggaran yang tidak memadai dan kurangnya motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai.

1) Tingkat Keluhan atau Pengaduan Terkait Pemeliharaan LPJ

Dalam beberapa kasus, tingkat keluhan yang tinggi dapat mencerminkan adanya masalah atau ketidakpuasan yang perlu segera ditangani. Tingkat keluhan yang rendah, di sisi lain, dapat menunjukkan bahwa pelayanan pemeliharaan LPJU telah berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara perlu secara aktif memantau dan menilai tingkat keluhan yang diterima, serta merespons dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Namun Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam merespon keluhan masyarakat terhadap LPJU masih kurang optimal.

2) Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat mencakup persepsi, harapan, dan pengalaman positif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kualitas, responsifitas, ketersediaan, dan keandalan layanan atau produk yang diterima. Kepuasan masyarakat kabupaten LabuhanBatu Utara terkait lampu penerangan jalan umum yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara menunjukan belum maksimal. Sebagian besar responden menyatakan ketidakpuasan terhadap respons Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara terhadap keluhan terkait LPJU yang rusak atau mati. Mayoritas dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten LabuhanBatu Utara merasa bahwa keluhan mereka tidak ditanggapi dengan cepat atau tidak ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif dari Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara tentang jadwal perawatan dan pemeliharaan LPJU juga menjadi perhatian utama. Sebagian besar masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi LPJU di wilayah mereka atau tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan layanan tersebut. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan menurun, dan kepuasan mereka terhadap pelayanan LPJU juga terpengaruh.

Jaringan dan Hubungan dengan Pihak Lain

Jaringan dan hubungan dengan pihak lain artinya organisasi menjalin hubungan eksternal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana komponen ini dilakukan dengan menjalin kerjasama ataupun kolaborasi dengan pihak lain. Seperti yang disampaikan oleh Roschelle (dalam Saleh, C. 2020:16) sebagai tekoordinasi, aktivitas sinkron

yang merupakan hasil dari upaya berkelanjutan untuk membangun dan memelihara konsepsi bersama mengenai suatu pemecahan masalah.

Dalam pengelolaan LPJU, Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara melakukan kolaborasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan masyarakat setempat yang bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem pencahayaan jalan umum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara, tentang koborasi, diperoleh bahwa sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bentuk kerjasama yang dilakukan seperti menyelenggarakan kampanye keselamatan berkendara malam hari, workshop tentang efisiensi energi, dan prgram-program lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga infrastruktur penerangan jalan. Lembaga Swadaya masyarakat juga berperan dalam memantau kinerja pengelolaan LPJU dan rekomendasi perbaikan Lampu jalan atau peningkatan dalam pemeliharaan LPJU.

Berdasarkan hasil data dan observasi yang diperoleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten LabuhanBatu Utara dalam pengelolaan Lampu penerangan Jalan Umum terkait kemampuan oganisasi dalam berkolaborasi atau kerjasama dalam pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum sudah dikatakan cukup baik.

KESIMPULAN

Kapasitas organisasi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan penerangan lampu jalan umum di Kabupaten Labuhan Batu Utara telah dijalankan, namun sesuai dengan hasil analisis atas komponen-komponen kapasitas organisasi yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, kepemimpinan, manajemen proses dan jaringan dan hubungna dengan pihak lain menunjukan masih didapati beberapa kendala pada proses pengelolaan LPJU diantaranya Sumber daya manusia masih kurang memadai dari segi kuantitas. Kemudian keseluruhan kondisi infrastruktur dinas perhubungan tidak terpenuhi dan memadai. Dinas Perhubungan sulit untuk menyelesaikan permasalahan lampu jalan, masih banyak keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ditambah anggaran untuk pengelolaan LPJU ini sangatlah kurang sehingga dinas perhubungan tidak dapat melakukan penambahan sarana dan prasarana. Selanjutnya untuk kepemimpinan, tindakan ini tidak mengarah ke kondisi yang baik. Selain itu, Manajemen proses dalam kapasitas organisasi ini tidak berjalan dengan optimal dan maksimal hal ini ditandai dengan capaian dan hasil akan pengelolaan

LPJU yang tidak menunjukkan kondisi yang baik. Terakhir untuk Jaringan dan hubungan dengan pihak lain, dalam keberlangsungannya Dinas Perhubungan melakukan hubungan dengan pihak lain dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perusahaan listrik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat yang bekerjasama untuk meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan berkelanjutan sistem pencahayaan jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, L., & Muharni, S. (2023). Aplikasi Layanan Pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 9(1), 352–360. <https://doi.org/10.37012/jtik.v9i1.1315>
- Anugerah, M. F. (2012). *Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012)*. Universitas Riau.
- Anugrah, A. R. S. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 319-328.
- Jannah, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Arboretum Gambut Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 191-201.
- Khoiriyah, L. S., & Alkadafi, M. (2020). Kinerja Organisasi Publik Dalam Mencapai Target Sasaran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 97-104.
- Lasiyono, M. M. (2022). Pengembangan Smart Monitoring System Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8).
- Manalu, S. S., & Thamrin, M. H. (2024). GAYA KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 78.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Putri, S. A., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 205-212.
- Sadad, A., & Meiwanda, G. (2022). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengelolaan Arboretum Gambut. *Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (PISIP)*, 2(1), 321-325.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Syafitri, A. D. A., Ubudiyah, K., Fatoni, M. A., & Bachtiyar, M. (2020). Implementasi Beban Kerja dan Kuantitas Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Pendma di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(2), 89–107. <https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.2.89-107>
- Syakira, A., & Zulkarnaini, Z. (2025). Efektivitas Pengembangan Program Ekoeduwisata Mangrove di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2358-2367.
- Widodo, A. (2016). Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 18(2), 87–96. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v18i2.7476>
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414-421.
- Yaumi, D. B., & Zulkarnaini, Z. (2024). Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Gambut Di Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 260-278.
- Yonanda, M. R., & Zulkarnaini, Z. (2025). Peran Ombudsman Wilayah Riau Dalam Penanganan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 2(1), 190-197.
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 317-322.
- Zulkarnaini, Z., & Purmasari, A. L. (2015). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Zulkarnaini, Z., Sadad, A., & Bedasari, H. (2023). Peningkatan Kompetensi Pengelola Arboretum Gambut Berbasis Eduwisata Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 153-157.